DISKOMINFO
KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BALIKPAPAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika (LKJIP) Tahun 2025 Kota Balikpapan. Adapun tujuan penyajian Laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

Penyusunan LKJIP ini telah didasarkan pada Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara da Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntablitias Kinerja Instansi Pemerintah.

Namun Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2024, sehingga perlunya saran maupun masukkan yang bersifat perbaikan dalam penyempurnaan laporan ini serta perbaikan kinerja Diskominfo tahun kedepannya. Kami yakin kedepannya dengan kinerja yang lebih baik lagi akan mampu mewujudkan seluruh aspirasi berbagai pihak maupun *stakeholder*. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan ini diharapkan dapat bermanfaat

sebagai bahan masukan, referensi dan informasi mengenai hasil kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada Tahun 2025. Akhirnya Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dan menyelesaikan penyusunan LJKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang memerlukan.

Balikpapan, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ERRIANSYAH HARYONO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tersebut, penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik serta urusan pemerintahan di bidang persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, pengembangan e-Government, persandian dan statistik sektoral;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan pengembangan e-Government, persandian dan statistik sektoral;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, pengembangan e-Government, persandian dan statistik sektoral;
4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada program prioritas daerah yang mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026, dalam pengukuran sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 yaitu:

1. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
2. Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Dimana keberhasilan ini disadari tidak terlepas dari dukungan segenap pemangku kepentingan/ stakeholders (Kepala Daerah dan unsur pimpinan di daerah , dinas/instansi terkait) serta masyarakat di Kota Balikpapan termasuk tentunya yang pasti dukungan penuh dari segenap komponen internal Diskominfo Kota Balikpapan.

Uraian dan status capaian dari ketiga indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel

Pengukuran Kinerja Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2025		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	94,65	96,12	101,55%
Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain kebijakan SPBE	4,50	4,70	104,44%
	Indeks Domain Layanan SPBE	4,32	4,45	103,01
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	4,00	4,60	115,00
	Indeks Domain Manajemen SPBE	2,64	2,64	100,00
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	75,00	75,18	100,24

Sumber: Pengukuran Kinerja Diskominfo Tahun 2025

Bilah dilihat pada tabel diatas maka realisasi 3 (tiga) IKU Diskominfo telah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada awal perencanaan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,04%.

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Realisasi Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika pada TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Anggaran Belanja Tahun 2025	Realisasi Belanja Tahun 2025	Presentasi Realisasi
1	Rp. 49.347.947.162,50	Rp. 41.258.097.132,00	83.61%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Diskominfo Tahun 2025

Secara umum kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika telah berjalan dengan baik dengan persentase realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 baik belanja operasional dan belanja modal sebesar 83.61%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vii**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah 5

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 25

1.6 Sistematika Penulisan 27

BAB II PERENCANAAN KINERJA **29**

2.1 Perencanaan Strategis 29

2.2 Indikator Kinerja Utama 43

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 51

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **61**

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya **61**

3.2. Capaian Kinerja Organisasi **65**

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 66

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 71

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis 78
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja) 83
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan..... 88
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) 100
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 131
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025 144
BAB IV PENUTUP 152
4.1. Kesimpulan 152
4.2. Saran 154

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025 v
Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 vi

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Diskominfo berdasarkan Jenis Kelamin 24
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Diskominfo berdasarkan Pangkat dan Eselon 24

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021 – 2026 31
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029 33
Tabel 2. 3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....35
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 44
Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 48
Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 51
Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....52
Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025- 2029 53
Tabel 2. 9 Anggaran Belanja Tahun 2025 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 55

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025 61

Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 62
Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja 66
Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025 67
Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2025 - 2029 70
Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025 dan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 72
Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 77
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 79
Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 82
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) 84

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029 terhadap SPM/Standar Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja) 87
Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 90
Tabel 3. 13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025 - 2029 96
Tabel 3. 14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra 101
Tabel 3. 15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin 132
Tabel 3. 16 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Menurut Tingkat Pendidikan 132
Tabel 3. 17 Efisiensi Pengguna Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika 135
Tabel 3. 18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) 141
Tabel 3. 19 Realisasi Anggaran Tahun 2025 146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 6

Gambar 3. 1 Dokumentasi Kerjasama Publikasi Diskominfo Tahun 2025 109

Gambar 3. 2 Dokumentasi Kanal Publikasi Diskominfo Tahun 2025 109

Gambar 3. 3 Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2025 110

Gambar 3.4 Dokumentasi Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 111

Gambar 3.5 Dokumentasi Pelayanan Informasi Publik 112

Gambar 3. 6 Dokumentasi Bimtek Layanan Aduan & PPID 113

Gambar 3. 7 Dokumentasi Kegiatan Layanan Hubungan Media 114

Gambar 3. 8 Dokumentasi Videotron 115

Gambar 3.9 Dokumentasi Bimtek Statistik Sektoral Tahun 2025 116

Gambar 3. 10 Buku Metadata Indikator dan Statistik Sektoral Tahun 2025 117

Gambar 3. 11 Dokumentasi Kegiatan SPBE Tahun 2025 122

Gambar 3. 12 Dokumentasi Kegiatan SMART CITY Tahun 2025 123

Gambar 3. 13 Dokumentasi Bimtek SPBE & SMART CITY Tahun 2025 124

Gambar 3. 14 Dokumentasi Pengembangan Aplikasi Tahun 2025 125

Gambar 3. 15 Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Tahun 2025 126

Gambar 3. 16 Dokumentasi Kegiatan Rapat Internal Tahun 2025 130

Gambar 3. 17 Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis Tahun 2025 130
Gambar 3. 18 Dokumen Survey Internal Pemahaman Kinerja Tahun 2025 130
Gambar 3. 19 Dokumentasi sosialisai Pengukuran Kinerja dan SKP Tahun 2025 131

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2021-2026
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025-2029
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025
10. Pengukuran Kinerja (E.81) Tahun 2025
11. Piagam Penghargaan Tahun 2025 (bila ada)
12. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan tersebut, penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik serta urusan pemerintahan di bidang persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan mempunyai fungsi sebagai beriikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, pengembangan e-Government, persandian dan statistik sektoral;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan pengembangan e-Government, persandian dan statistik sektoral;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, pengembangan e-Government, persandian dan statistik sektoral;

4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* salah satunya didasari dengan asas akuntabilitas yang memerlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang wajid disusun oleh instansi pemerintah baik dari tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan perangkat daerah untuk mengetahui tingkat akuntabilitasnya. LKJIP ini disusun sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 sekaligus sebagai kendali dan pemicu peningkatan kinerja di setiap unit kerja Dinas komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, khususnya Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang, yang terkait dengan reformasi birokrasi disebutkan bahwa "Pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dipusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya";
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 06 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 11 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;
12. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 19 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor 188.46-14/DISKOMINFO/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor 188.46-14/DISKOMINFO/2022 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026;
15. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor 900/3/M/DISKOMINFO tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini adalah :

1. Memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan;
2. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026;
3. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, yang membawahkan:
    1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
    2. Subbagian Umum;

c. Bidang Informasi dan Komunikasi, yang membawahkan:
   1. Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi;
   2. Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang e-Goverment, yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. UPTD.

Adapun susun organisasi ini dapat dilihat pada gambar berikut:

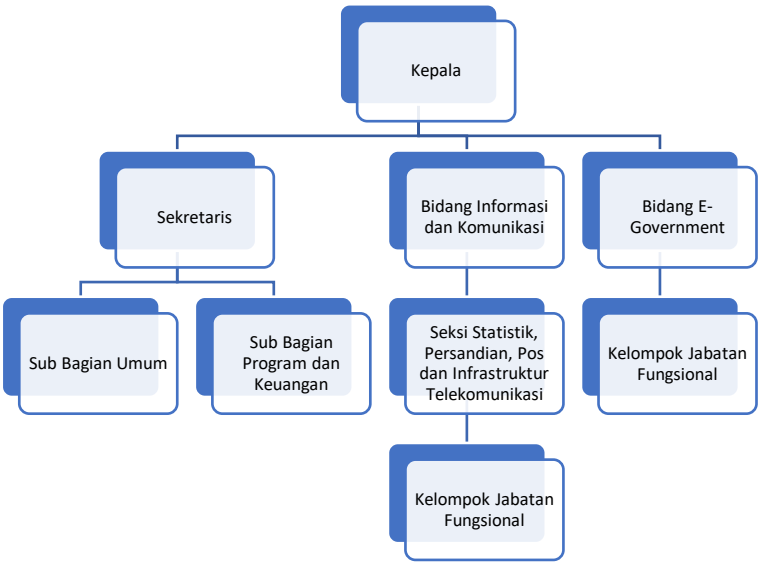

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Sumber : Perwali Kota Balikpapan No 1 tahun 2022

Adapun tugas dan fungsi dari setiap susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
   a. menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
   b. mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan e-Government, persandian , dan statistik sektoral;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi dan pengembangan e-Govenment, persandian , statistik sektoral, dan bina e-Government,
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi, pengembangan e-Government, persandian , dan statistik sektoral;
d. pelaksanaan pemantauan , evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian

a. perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja;
b. administrasi keuangan;
c. administrasi barang milik Daerah pada Dinas;
d. administrasi kepegawaian;
e. administrasi umum ;
f. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;

g. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
h. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
i. layanan informasi dan pengaduan; dan
j. pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat melaksanakan fungsi:
a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
b. pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan retribusi;
h. pelaksanaan administrasi keuangan;
i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan standar pelayanan publik;
k. pengelolaan survei kepuasan masyarakat;
l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
m. pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksana;

n. pengoordinasian pengelolaan, pengem bangan system teknologi informasi;
o. pengoordinasian bidang dan UPTD;
p. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

1. Subbagian Umum , mempunyai tugas:
    a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
    b. mengelola tertib administrasi perkantoran d an kearsipan;
    c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
    d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
    e. menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor / rumah tangga;
    f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
    g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
    h. melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
    i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;

j. menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
n. memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
o. mengelola informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana;
p. menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
q. memfasilitasi pembinaan tatakelola pelayanan publik;
r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
s. melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas:
   a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi :
      1) Rencana strategis
      2) Rencana kerja
      3) Rencana kerja tahunan
      4) Penetapan kinerja; dan
      5) Laporan kinerja

b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan ;
c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
d. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
e. mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
g. melaksanakan dan menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Perangkat Daerah dan website Pemerintah Daerah;
h. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
i. mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran /dokumen pelaksanaan anggaran;
j. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
k. melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
l. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
m. mengoordinir dan meneliti anggaran;
n. menyusun laporan keuangan Dinas;
o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjaw aban pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi melaksanakan fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Informasi dan Komunikasi;
b. perumusan kebijakan bidang informasi komunikasi publik dan statistik ;
c. pengelolaan data dan informasi publik;
d. pengelolaan dan penyediaan konten lintas sektoral;
e. pengelolaan media komunikasi publik;
f. pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non pemerintah ;
g. pelaksanaan pelayanan informasi publik, kehumasan, dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
i. pelaksanaan pengelolaan media pengaduan publik Pemerintah Daerah;
j. pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi utama ;
k. penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah;

l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

1. Seksi statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi, mempunyai

   tugas :

   a. menyusun program dan kegiatan Seksi Statistik, Persandian, Pos dan Infrastruktur Telekomunikasi;
   b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang statistik, persandian , pos dan infrastruktur telekomunikasi;
   c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data statistik sektoral Pemerintah Daerah;
   d. menyiapkan bahan publikasi terkait data statistik sektoral;
   e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral;
   f. melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam peningkatan mutu statistik sektoral Daerah yang terintegrasi;
   g. melaksanakan pembangunan metadata statistik sektoral;
   h. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral;

i. melaksanakan pengembangan infrastruktur statistik sektoral;
j. menyelenggarakan otorisasi statistik sektoral di daerah;
k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Substansi Informasi dan Publikasi, mem punyai tugas:
   a. menyusun program dan kegiatan Substansi Informasi dan Publikasi;
   b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan informasi dan komunikasi;
   c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi;
   d. melaksanakan analisa dan pengelolaan data informasi komunikasi publik;
   e. melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi;
   f. melaksanakan layanan pemantauan dan evaluasi isu, opini dan aspirasi publik di media;
   g. mengelola media center dan layanan pengaduan masyarakat;
   h. melaksanakan layanan informasi dan komunikasi lintas sektoral secara online dan terintegrasi;
   i. menyiapkan laporan berkala perkembangan opini publik;

j. menyiapkan dan menganalisis bahan rekomendasi tindakan secara tepat waktu kepada pimpinan;
k. melaksanakan pemantauan informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
l. melaksanakan manajemen komunikasi krisis;
m. menyelenggarakan penyediaan /pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
n. melaksan akan pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dibidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Kemitraan dan Komunikasi, mempunyai tugas:
   a. Menyusun program d an kegiatan Substansi Kemitraan dan Kom unikasi;
   b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan kemitraan dan publikasi;
   c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan dan publikasi;
   d. melaksanakan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas;
   e. melaksanakan kemitraan dengan pemangku kepentingan;

f. melaksanakan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan penyediaan konten lintas sektoral;
g. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah
h. mengoordinasikan peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah;
i. melaksanakan publikasi informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui media online dan offline;
j. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah /media internal;
k. melaksanakan pembuatan konten lokal dan perencanaan media komunikasi publik;
l. melaksanakan pengelolaan konten nasional menjadi konten lokal;
m. melaksanakan pengelolaan media komunikasi publik;
n. melaksanakan layanan hubungan media;
o. melaksanakan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG *E-GOVERNMENT*

Bidang e-Government mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang e- Government.

Bidang E-Government melaksanakan fungsi :

a. penyusunan program dan kegiatan Bidang e-Government;
b. perumusan kebijakan dibidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, dan pengembangan SPBE, serta persandian;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, serta pengembangan SPBE dan persandian;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, serta pengembangan SPBE dan persandian;
e. pemantauan , evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi, pengelolaan data dan aplikasi, serta pengembangan SPBE dan persandian;
f. pengaturan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan / atau sejenisnya berupa kabel (wireline) dan / atau nirkabel (wireless);
g. pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup Pemerintah Daerah;
h. pengoordinasian pendaftaran nama domain Pemerintah Daerah;

i. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
j. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
k. pengoordinasian pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan perangkat daerah lainnya;
l. pelaksanaan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi pada pusat data
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oieh pimpinan /atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang e-Government menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

1. Substansi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas :
   a. Menyusun program dan kegiatan Substansi Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
   b. Menyusun standar operasional dan prosedur layanan infrastruktur dan keamanan informasi;
   c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan infrastruktur dan keamanan informasi;
   d. menyelenggarakan dan mengembangkan pusat data dan pusat pemulihan data;

e. melaksanakan pengawasan dan layanan pengembangan jaringan komunikasi data fiber optic, wireline dan wireless;
f. melaksanakan penetapan alokasi internet protokol dan numbering di lingkungan Pemerintah Daerah;
g. melaksanakan pemantauan trafik elektronik;
h. melaksanakan keamanan infrastruktur sistem informasi;
i. melaksanakan audit infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan SPBE;
k. menyiapkan bahan perumusanan analisa dan pengendalian infrastruktur telekomunikasi;
l. melaksanakan pengendalian dan pembinaan jaringan telekomunikasi;
m. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi;
n. mengoordinasikan bahan rekomendasi, pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan jasa internet;
o. menyelenggarakan layanan pengelolaan pusat data;
p. menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan nama domain dan subdomain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan;
q. menyiapkan bahan penetapan tata kelola pendaftaran nama domain, subdomain Pemerintah Daerah;

r. menyelenggarakan sistem jaringan intra Pemerintah Daerah;
s. menyelenggarakan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah;
t. melaksanakan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
u. melaksanakan pemantauan , evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
v. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Substansi Data dan Aplikasi, mempunyai tugas :
   a. menyusun program dan kegiatan Substansi Data dan Aplikasi;
   b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan data dan aplikasi;
   c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan data dan pengembangan aplikasi;
   d. melaksanakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi serta proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik;
   e. menyelenggarakan, mengembangkan dan memelihara sistem integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
   f. melaksanakan peningkatan kapasitas pemanfaatan sistem informasi pemerintah dan sistem informasi publik;
   g. menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan ;

h. menyelenggarakan layanan interkonektivitas layanan publik kepemerintahan melalui pusat Application Program Interface (API) Daerah;
i. menyelenggarakan layanan pengembangan business process re- engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder smartcity);
j. menyelenggarakan layanan sistem informasi smartcity, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
k. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem smartcity daerah;
l. melaksanakan pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi dan sistem informasi;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan Perangkat Daerah lainnya;
n. melaksanakan pengamanan aplikasi pada pusat data;
o. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
p. melaksanakan keamanan informasi pemerintahan Daerah berbasis elektronik;
q. menyelenggarakan integrasi pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi serta SPBE Pemerintah Daerah;
r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Substansi Bina E-Government, mempunyai tugas :
   a. menyusun program dan kegiatan Substansi Bina e-G overnment,
   b. menyusun standar operasional dan prosedur layanan bina tata kelola SPBE;
   c. menyelenggarakan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, serta pemulihan data dan informasi;
   d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan SPBE;
   e. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi bidang SPBE;
   f. melaksanakan pemantauan , evaluasi, pengelolaan dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah;
   g. melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi, informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
   h. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi, informasi dan komunikasi;
   i. menyiapkan bahan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implem entasi SPBE Daerah;
   j. menyelenggarakan koordinasi kerjasama bidang SPBE dengan instansi/lembaga terkait;

k. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi SPBE dan smartcity,
l. melaksanakan implementasi SPBE dan smartcity, promosi pemanfaatan layanan smartcity;
m. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas;
n. menyelenggarakan penatalaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
o. melaksanakan sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik;
p. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem SPBE;
q. melaksanakan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah;
r. melaksanakan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah;
s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan /atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan Jl. Jend. Sudirman RT.11 No. 86 Kelurahan Klandasan Ulu (samping

Kantor BPS) Kantor ini ditempati oleh Kepala Dinas, Sekretariat Dinas dan Bidang Informasi dan Komunikasi, sedangkan untuk bidang e-Government Dinas komunikasi dan Informatika menempati kantor di Balai Kota Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman RT. 13 No. 1 Kelurahan Klandasan Ulu.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki sumber daya aparatur sebanyak 51 orang. Berikut rincian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan:

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai Diskominfo berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	ASN	NON ASN	Total
Jumlah Pegawai Wanita	22	5	27
Jumlah Pegawai Laki-Laki	25	10	35
TOTAL	**47**	**15**	**62**

Sumber: Data Kepagawaian Diskominfo Tahun 2025

Tabel 1. 2
Jumlah Pegawai Diskominfo berdasarkan Pangkat dan Eselon

No	URAIAN	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PPPK	Non ASN	Jumlah
1	Kepala Dinas	1			1						1
2	Sekretaris		1		1						1
3	Kepala Bidang		1		1						1
4	Kepala Sub Bagian			2		2					2
5	Kepala Seksi			1		1					1
6	Kelompok Jabatan Fungsional					11	1		15		27
7	Pelaksana					4	2		8	15	29
										TOTAL	**62**

Sumber: Data Kepagawaian Diskominfo Tahun 2025

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Rencana lima tahun ke depan suatu Perangkat Daerah sangat ditentukan dari analisis isu-isu strategisnya. Analisis isu-isu strategis ini dilakukan untuk melengkapi tahap-tahap sebelumnya dalam, penyusunan Renstra OPD. Sasaran dan program pembangunan ditentukan dari identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis. Mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan yang terjadi adalah langkah dalam memperoleh isu strategis.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Komunikasi dan Informatika
    - Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;
    - Belum optimalnya Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat;
    - Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
    - Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Balikpapan;
    - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
    - Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
    - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce;
    - Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
    - Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.
2. Statistik
    - Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
    - Belum optimalnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
    - Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

3. Persandian
   - Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
   - Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
   - Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
   - Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat :

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
1.6 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat :

2.1 Perencana Strategis
2.2 Indikator Kinerja Utama
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat :

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya
3.2 Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan. Adapun visi dan misi Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Visi :

”Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Misi :

1. Mewujudkan penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah **: "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel"**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Kualitas Penerapan Sistem Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan terdapat target dari IKU yang telah dijelaskan pada tabel diatas adalah sebagai beriku

Tabel 2. 1

Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	86	87	88	89	90	90
	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	N/A	2,45	2,6	2,8	3,0	3,2
		Indeks Domain Layanan SPBE	N/A	3,50	3,70	3,75	3,80	3,90
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	N/A	3,1	3,3	3,5	3,7	3,8
		Indeks Domain Manajemen SPBE	N/A	2,0	2,1	2,3	2,4	2,5
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,27	31	32	33	34	35

Sumber: Renstra Diskominfo Tahun 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2025 -2029 adalah sebagai berikut :

Visi :

"Balikpapan Kota Global Nyaman untuk semua Dalam Bingkai Madinatul Iman"

Misi :

1. Membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bersih dan professional berorientasi pada pelayanan Masyarakat
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur terpadu yang dapat memenuhi melayani seluruh kebutuhan masyarakat Balikpapan
3. Membangun dan mengembangkan menjaga kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan Masyarakat yang sehat dan terdidik
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua
5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman

Visi misi Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029 menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik		Indeks Literasi Digital (Indeks)	-	-	3,6	3,7	3,8	3,9
	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	-	60	62,5	65	70	75
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	94,64	94,65	94,66	94,68	94,7	94,85
	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,26	75,00	76	77	77,5	78
	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,23	2,23	2,28	2,33	2,38	2,43

Sumber: Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3

Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	-			
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai RB	34	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	75,18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
								Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pengadaan Aset Tak Berwujud

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE;	3	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	60	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
	Indeks Domain Layanan SPBE;	3,8						
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,7					Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
	Indeks Domain	2,4						Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Manajemen SPBE.							Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
								Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
								Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
								Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
								Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
								Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas
								Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi
								penyelenggaraan SPBE
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	90	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	94,65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Relasi Media
								Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
								Pelayanan Informasi Publik
								Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pengelolaan Media Komunikasi Publik
								Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
								Penyusunan Konten
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	90	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,23	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
								Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
								Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE; Indeks Domain Layanan SPBE;	3 3,8	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	60	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	3,7						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
	Indeks Domain Manajemen SPBE.	2,4						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Rencana Strategis Tahun 2021 dan 2026 & Rencana Strategis Tahun 2025 -2029

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor : 188.46-14/DISKOMINFO/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. Namun pada tahun 2023 terdapat reviu dan perubahan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 dan hasil rekomendasi hasil evaluasi AKIP Kota Balikpapan Tahun 2023 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor : 188.46/1222/M/DISKOMINFO tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor : 188.46-14/DISKOMINFO/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, sehingga perubahan IKU tersebut menjadi :

Tabel 2. 4

Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian terhadap keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kaltim kepada kabupaten/kota	Hasil Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim terkait keterbukaan informasi publik yang terdiri atas : 1. Aspek Kualitas Informasi; 2. Aspek Jenis Informasi; 3. Inovasi dan Strategi; 4. Komitmen Organisasi; 5. Sarana dan Prasarana; 6. Aspek Digitalisasi.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain kebijakan SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator kebijakan internal yang mendukung penerapan tim koordinasi SPBE, perencanaan, strategi, manajemen dan audit TIK SPBE	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : a. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan b. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola c. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi d. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Indeks domain layanan SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan BMN, pengawasan, akuntabilitas, kinerja, pengaduan publik, data terbuka, JDIH, dan layanan publik unggulan lainnya.	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Informasi e. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Interaksi f. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Transaksi g. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Kolaborasi Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kemenerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator arsitektur, peta rencana, anggaran, proses bisnis SPBE, pelaksanaan tugas Tim Koordinator SPBE dan kolaborasi penerapan SPBE	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : h. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan i. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola j. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi k. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Penilaian tingkat kematangan indikator manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset, SDM, pengetahuan, perubahan, layanan SPBE, audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE	Hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PAN-RB, Republik Indonesia dengan kriteria penilaian sebagai berikut : l. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu) : Level 1 – Rintisan m. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua) : Level 2 – Terkelola n. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga) : Level 3 – Terdefinisi o. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat) : Level 4 – Terpadu dan terukur Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima) : Level 5 – Optimum	Kementerian PAN-RB Republik Indonesia	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Balikpapan	Inspektorat Kota Balikpapan	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Diskominfo Tahun 2021-2026

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor 900/3/M/DISKOMINFO tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 5

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital	Pengukuran sistematis terhadap kemampuan, pengetahuan, dan perilaku pengguna internet dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, aman, dan produktif	Indeks ini disusun berdasarkan survei yang mengukur empat pilar utama Cakap Digital (Digital Skills), Budaya Digital (Digital Culture), Etika Digital (Digital Ethics), Aman Digital (Digital Safety) dengan skala 1-5, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan tingkat literasi digital yang lebih baik.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.1	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Perangkat Daerah) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap layanan digital dan keamanan cyber yang diberikan oleh Diskominfo.	Indeks ini diukur melalui survei yang melibatkan pengguna layanan (Perangkat Daerah) untuk memberikan umpan balik mengenai berbagai aspek layanan digital, seperti kemudahan akses, kecepatan, keandalan, kualitas, dan keamanan informasi yang diberikan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 mengatur tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan pedoman perhitungannya.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Kota Balikpapan telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).	Hasil Evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Kaltim terkait keterbukaan informasi publik yang terdiri atas : 1. Aspek Kualitas Informasi; 2. Aspek Jenis Informasi; 3. Inovasi dan Strategi; 4. Komitmen Organisasi; 5. Sarana dan Prasarana; 6. Aspek Digitalisasi.	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Komunikasi dan Informatika
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Balikpapan	Inspektorat Kota Balikpapan	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Indeks Pembangunan Statistik mengukur tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Penilaian pada pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari: a) domain, merupakan area pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; b) aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai; dan indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral yang dinilai.	Badan Pusat Statistik (BPS)	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka disepakati perjanjian kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan perangkat daerah dibawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas fungsi wewenang dan sumber daya yang tersedia sebagai perwujudan pencapaian kinerja secara berkesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya.

Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur , sebagai tolokukur dasar evaluasi kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Perjanjian kinerja Tahun 2025 dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 6

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	90
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	3,0
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,80
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	3,7
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	66,50

Sumber: Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2025

Agar perencanaan tetap relevan dengan dinamika pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan serta memastikan akuntabilitas maka berdasarkan hasil evaluasi terdapat penyesuaian target agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual. Adapun penyesuaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 7

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,65
2	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain kebijakan SPBE	Nilai	4,50
		Indeks domain layanan SPBE	Nilai	4,32
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	4,0
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,64
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	75,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Diskominfo Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 sebagai tahun transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka juga disusun Perjanjian Kinerja Perbahan tahun 2025 yang mengacu pada Renstra tahun 2025-2029. Penyusunan

perjanjian kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodir penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang baru, sekaligus menjaga kesinambungaan pengelolaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada masa transisi perencanaan. Adapun perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 atas Renstra tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 8

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025- 2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	Indeks	-	-
1.1	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks	-	60
1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Nilai	94,64	94,65
1.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	74,26	75,00
1.4	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Poin	2,23	2,23

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Diskominfo Tahun 2025

Guna mencapai target kinerja sasaran Strategis tahun 2025 diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan–kegiatannya dengan anggaran murni Tahun 2025 sebesar **Rp.45.452.990.928,-** dan melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2025 sebesar **Rp.49.047.947.162,50,-** Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2. 9

Anggaran Belanja Tahun 2025 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	75,00	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Rp**	**11.558.199.282,00**	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp**	**7.706.290.000,00**	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	7.706.290.000,00	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp**	**968.574.340,00**	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	62.574.340,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	840.000.000,00	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	66.000.000,00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp**	**1.535.225.912,00**	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	11.923.800,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	979.710.700,00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	298.288.050,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	25.219.610,00	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	19.982.000,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	200.101.752,00	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp**	**381.800.000,00**	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	93.600.000,00	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	187.200.000,00	
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Rp	101.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**595.407.580,00**	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	539.000,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	190.895.600,00	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	15.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	388.972.980,00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**370.901.450,00**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 137.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 179.600.000,00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 29.301.450,00	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 25.000.000,00	
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	4,50	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Rp 10.000.000,00**	
		Indeks Domain Layanan SPBE	4,32	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 10.000.000,00**	
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	4,0	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Rp 10.000.000,00	
		Indeks Domain	2,64	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Rp 13.981.946.320,00**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		Manajemen SPBE		**Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp 13.981.946.320,00**	
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp 1.067.738.295,00	
				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Rp 917.600.000,00	
				Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp 707.009.410,00	
				Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Rp 30.948.795,00	
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp 942.320.965,00	
				Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Rp 32.248.590,00	
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp 831.959.723,00	
				Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 7.229.824.272,00	
				Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp 2.096.076.270,00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
				Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Rp 126.220.000,00	
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	94,65	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Rp 22.783.736.680,00**	
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 22.783.736.680,00**	
				Relasi Media	Rp 82.490.000,00	
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp -	
				Pelayanan Informasi Publik	Rp 170.577.375,00	
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp 759.160.525,00	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp 18.163.219.740,00	
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Rp 199.245.000,00	
				Penyusunan Konten	Rp 3.409.044.040,00	
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	94,65	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Rp 685.631.022,50**	
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Rp 685.631.022,50**	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran		Keterangan
1	2	3	4	5	6		7
				Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp	266.434.917,50	
				Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp	255.496.105,00	
				Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Rp	163.700.000,00	
5	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	4,50	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Rp**	**328.433.858,00**	
		Indeks Domain Layanan SPBE	4,32	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	328.433.858,00	
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	4,0	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	133.486.808,00	
		Indeks Domain Manajemen SPBE	2,64	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp	140.000.000,00	
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	54.947.050,00	
Jumlah					**Rp**	**49.347.947.162,50**	

Sumber: DPA Perubahan Diskominfo Tahun 2025

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Kota Balikpapan. Adapun hasil evaluasi tersebut adalah:

Tabel 3. 1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2024 Atas Penilaian Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,93
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,21
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,57
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	17,47
Nilai Akuntanilitas Kinerja		**100%**	**75,18**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025

Sebagai upaya untuk mengefektifkan penerapan AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan adapun tindak lanjut dari hasil rekomendasi oleh Tim Inspektorat Kota Balikpapan yang disampaikan melalu Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Tahun 2025

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	Melakukan reviu penetapan target kinerja pada dokumen perencanaan agar selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Penetapan target kinerja agar disertai dengan data dan bukti yang andal, relevan serta challenging (menantang) agar target kinerja akurat	Melaksanakan reviu target kinerja secara periodik serta berkoordinasi dengan Bappedalitbang dalam penetapan target kinerja dan menyertakan bukti dukung yang andal
2.	Pelaporan Kinerja	Melakukan penyempurnaan inputran data pada REAKSI sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi mulai tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah sampai ke tingkat individu pegawai	Menyempurnakan inputan data target dan realisasi kinerja pada aplikasi REAKSI serta berkoordinasi dengan Bappedalitbang Kota Balikpapan untuk penyempurnaan penginputan tersebut

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
3.	Pengukuran Kinerja	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan penyajian informasi dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai Diskominfo terkait hasil pengukuran kinerja
		Dalam pengukuran capaian kinerja agar pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dan didokumentasi sebagai bukti dukung kegiatan	Pemimpin akan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan dan menyertakan bukti dukung kegiatan
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Menyempurnakan laporan kinerja agar analisis keberhasilan/kegagalan dapat diandalkan untuk memberikan gambaran atas kondisi capaian kinerja	Berkoordinasi lebih intens dengan bidang pengampu kinerja dalam penyusunan laporan agar dapat menyempurnakan analisis keberhasilan/kegagalan dapat diandalkan untuk memberikan gambaran atas kondisi capaian kinerja

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan menggambarkan peningkatan kinerja	Menggunakan laporan kinerja sebagai acuan dalam penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja ke depan menggambarkan peningkatan kinerja
		Mendorong evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dilakukan pada tahun berjalan sehingga dapat segera ditindaklanjuti serta mendorong perbaikan atas kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Membuat rencana tindak lanjut dan laporan rencana tindaklanjut hasil pada tahun berjalan serta berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Balikpapan sebagai upaya mendorong evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dilakukan pada tahun berjalan sehingga dapat segera ditindaklanjuti serta mendorong perbaikan atas kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Diskominfo tahun 2025

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan menjadin Indikator Kinerja Utama merupakan gambaran atas evaluasi kinerja sasaran yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026. Target kinerja dimaksud menunjukan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program/kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Kinerja akhir tahun pelaksanaan memuat penjabaran dan analisis realisasi capaian kinerja sasaran strategis sejak triwulan pertama sampai dengan triwulan akhir pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Skala penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Sistematika Lakip Tahun 2025

Berdasarkan realisasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025, maka dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan realisasi serta capaian kinerja Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada Tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2021–2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Preedikat
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,65	96,12	101,55	Melebihi Target
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	4,50	4,70	104,44	Melebihi Target
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	4,32	4,45	103,01	Melebihi Target
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	4,00	4,60	115,00	Melebihi Target
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,64	2,64	100,00	Tercapai/ Sesuai Target
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	75,00	75,18	100,24	Melebihi Target

Sumber: Pengukuran Kinerja Diskominfo Tahun 2025

Realisasi kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebesar 96,12 dengan predikat **melebihi target** ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 001/KEP/KI-KALTIM/X/2025 Tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Badan Publik di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Untuk realisasi kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan dengan indikator kinerja Indeks Domain Kebijakan SPBE dengan nilai 4,70 dengan predikat "**melebihi target"**, indikator Indeks Domain Layanan SPBE dengan nilai 4,45 dengan predikat **"melebihi target"**, indikator Indeks Domain Tata Kelola SPBE dengan nilai 4,60 dengam predikat "**melebihi target"**, dan indikator Indeks Domain Manajemen SPBE dengan nilai 2,64 dengan predikat **"sesuai target"** ditetapkan dalam Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/76/M.PD.06/2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2025. Dan untuk realisasi sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Diskominfo adalah 75,18 dengan Predikat BB **"melebihi target"**, ditetapkan didalam Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kota Balikpapan Nomor 700/105//IRBAN-III/ITKOT Tanggal 19 Mei 2025.

Dari data capaian pada tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator adalah **104,37%** dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **"melebihi target**". Dengan demikian, dari rata-rata capaian kinerja diatas secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam implementasi strategi yang telah dirancang. Faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian ini meliputi efektivitas perencanaan dan implementasi program, dukungan infrastruktur dan teknologi, komitmen terhadap keterbukaan informasi, peningkatan akuntabilitas, sinergi antar bidang dan pengkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan serta sinergi dengan pemangku kepentingan.

Dalam masa transisi perencanaan maka terdapat Perjanjian Kinerja perubahan atas Renstra tahun 2025-2029 adapun perbandingan target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Diskominfo Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	Indeks	-	-	-	-
1.1	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks	60	61	101,67	Melebihi Target
1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Nilai	94,65	96,12	101,55	Melebihi Target
1.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	75,00	75,18	100,24	Melebihi Target
1.4	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Poin	2,23	2,23	100,00	Tercapai / Sesuai Target

Sumber : Pengukuran kinerja Diskominfo atas Renstra Diskominfo Tahun 2025 – 2029

Dari tabel diatas untuk target kinerja tujuan yakni Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik dengan indikator Indeks Literasi Digital (Indeks) belum terdapat target dan realisasi tahun 2025 dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran untuk pelaksanaan survey pada saat penetapan dokumen Renstra Diskominfo tahun 2025-2029. Realisasi kinerja ini dapat direalisasikan pada tahun 2026 – 2029 karena realisasi kinerja ini membutuhkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2025 merupakan tahun keempat realisasi kinerja dari indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 dan juga tahun awal merupakan tahun awal penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2025-2029. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dilaksanakan sebagai bahan analisa capaian per tahun sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Untuk rincian realisasi dan capaian kinerja dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan PK Perubahan Tahun 2025 dan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	86	-	87	100%	95,16	108%	94,64	106,34 %	96,12	101,55%
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	N/A	-	3,10	127%	4,60	177%	4,50	160,71 %	4,70	104,44%
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	N/A	-	3,82	109%	4,07	110%	4,32	115,20 %	4,45	103,01%
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	N/A	-	2,60	84%	3,70	112%	3,90	111,43 %	4,60	115,00%
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	N/A	-	1,55	78%	2,27	108%	2,64	114,78 %	2,64	100,00%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	64,30	-	68,12	105%	70,38	107%	74,26	112,52 %	75,18	100,24%

Sumber: Pengukuran Kinerja Tahun 2022 - 2025

Adapun realisasi kinerja dari indikator kerja sasaran strategis pada tabel diatas mengalami peningkatan nilai apabila dibandingkan nilai capaian pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja dari sasaran strategis yang dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian awal perencanaan yakni tahun 2021, adapun perbandingan tersebut adalah :

1. **Sasaran Strategis :**

   Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

   Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Dimana realisasi kinerja ini merupakan hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada tahun awal penyusunan perencanaan yakni pada tahun 2021 adalah 86 dan capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2024 adalah 94,64 dengan predikat Informatif dan realisasi tahun 2025 adalah 96,12 dengan predikat informatif.

   Jika dibandingkan kenaikan nilai dari tahun 2024 ke tahun 2025 peningkatan nilai sebesar 1,48 dari nilai 94,64 dengan capaian 106,34% dari target ke tahun 2025 dengan nilai 96,12 capaian pada tahun 2024 adalah 106,34% dari target kinerja sebesar nilai 89. Bila dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 ada penurunan tingkat capaian 1,7% yakni capaian tahun 2023 adalah 108% dengan realisasi 95,16 dari target kinerja 88 dan capaian tahun 2024 adalah 106,34% dengan realisasi 94,64 dari target kinerja 89. Namun

capaian tahun 2024 masih melebihi target yang ditelah ditetapkan di awal perencanaan.

2. **Sasaran Strategis :**

   Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan

   Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Indeks Domain Kebijakan SPBE, Indeks Domain Layanan SPBE, Indeks Domain Tata Kelola SPBE dan Indeks Domain Manajemen SPBE. Untuk capaian indikator pada sasaran strategis ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada awal tahun penyusunan perencanaan yakni tahun 2021 karena pada tahun tersebut data capaian indikator ini tidak tersedia. Untuk melihat perbandingan capaian tahun 2025 dengan tahun sebelumnya yakni 2024 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

   - Indikator Indeks Domain Kebijakan SPBE capaian kinerja tahun 2024 adalah 160,71% dengan realisasi kinerja 4,50 dari target kinerja 2,8 dan capaian tahun 2025 adalah 104,44% dengan realisasi kinerja 4,70 dari target kinerja 4,50. Ada peningkatan realisasi dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 0,20.
   - Indikator Indeks Domain Layanan SPBE capaian kinerja tahun 2024 adalah 115,20% dengan realisasi kinerja 4,32 dari target kinerja 3,75 dan capaian tahun 2025 103,01% dengan realisasi kinerja 4,45 dari target kinerja 4,32. Adapun kenaikan realisasi dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 0,13.

- Indikator Indeks Domain Tata Kelola SPBE capaian kinerja tahun 2025 103,01% dengan realisasi 4,60 dari target kinerja 4,00 dan capaian tahun 2024 adalah 111,43% dengan realisasi 3,90 dari target 3,5 bila dilihat dari persentase capaian ada penurunan hal ini dikarenakan adanya perubahan target kinerja tahun 2025 yang lebih optimis dan secara realisasi tahun 2025 melebihi realisasi tahun 2024.
- Indikator kinerja Indeks Domain Manajemen SPBE capaian kinerja tahun 2025 100% dengan realisasi kinerja 2,64 dari target kinerja 2,64 dan capaian tahun 2024 114,78% dengan realisasi 2,64 dari target kinerja 2,3 bila dilihat dari persentase capaian ada penurunan hal ini dikarenakan adanya perubahan target kinerja tahun 2025 yang lebih optimis dan secara realisasi tahun 2025 melebihi realisasi tahun 2024.

3. Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah Nilai SAKIP Diskominfo. Realisasi dari indikator ini merupakan hasil penilaian dari Inspektorat Kota Balikpapan. Adapun capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan pada tahun awal penyusunan perencanaan yakni tahun 2021 adalah nilai 64,30. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2025 100,24% dengan

realisasi 75,18 dari target 75,00 dan capaian tahun 2024, 112,52% dengan realisasi 74,26 dari target 66 maka nilai SAKIP Diskominfo mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Tahun 2025 sebagai masa transisi, terdapat juga capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2025-2029 sehingga tahun 2025 digunakan sebagai baseline bagi indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Adapun perbandingan realisasi kinerja tersebu adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025		
								Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	Indeks	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks	-	-	-	-	60,00	61	101,67%
1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Nilai	86	87	95,16	94,64	94,65	96,12	101,55%
1.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	64,3	68,12	70,38	74,26	75,00	75,18	100,24%
1.4	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Poin	-	-	-	2,23	2,23	2,23	100,00%

Sumber : Pengukuran kinerja Tahun 2025 - 2029

Dari tabel diatas terdapat indikator tujuan dan sasaran yang baru digunakan pada renstra tahun 2025 - 2029 hal ini sebagai penyesuaian terhadap kebijakan dan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2025 – 2029. Adapun indikator kinerja tujuan yakni indeks literasi digital belum dapat di hitung realisasi nya dikarenakan penetapan target kinerja baru pada tahun 2026 – 2029. Untuk indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah baru direalisasikan tahun 2025 dan tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ini sebagai salah satu komponen dalam penilaian pemerintah digital. Indikator sasaran Indeks Pembangunan Statistik (IPS) baru digunakan pada renstra tahun 2025 - 2029 namun telah ada realisasi tahun 2024 dengan nilai yang sama pada tahun 2025 dikarenakan penilaian ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Realisasi kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9 =6/8*100
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,65	96,12	101,55%	90,00	107%
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	4,5	4,7	104,44%	3,2	147%
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	4,32	4,45	103,01%	3,9	114%
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	4	4,6	115,00%	3,8	121%
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,64	2,64	100,00%	2,5	106%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	75	75,18	100,24%	67,0	112%

Sumber: E.81 (REAKSI) Tahun 2025

Dari data pada tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2025 realisasi kinerja pada perencanaan jangka menengah dengan 3 (tiga) sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerjanya memiliki tingkat kemajuan yang tinggi apabila disandingkan dengan target kinerja akhir tahun target jangka menengah Rencana Strategis. Adapun tingkat kemajuan dari setiap indikator kinerja terhadap target akhir renstra adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik dengan tingkat kemajuan sebesar 101,55%;
2. Indeks Domain Kebijakan SPBE dengan tingkat kemajuan sebesar 104,44%;
3. Indeks Domain Layanan SPBE dengan tingkat kemajuan sebesar 103,01%;
4. Indeks Domain Tata Kelola SPBE dengan tingkat kemajuan sebesar 115,00%;
5. Indeks Domain Manajemen SPBE dengan tingkat kemajuan sebesar 100%;
6. Nilai SAKIP Diskominfo dengan tingkat kemajuan sebesar 100,24%.

Dari realisasi dan capaian kinerja diatas, dapat diketahui capaian tahun 2025 telah melampaui target akhir renstra yakni tahun 2026.

Selain perbandingan diatas, realisasi kinerja tahun 2025 juga dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029. Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan renstra menjadi baseline awal bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja. Perbandingan ini dapat menjadi gambaran awal

tentang pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029. Adapun perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3. 9

Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026/ 2029*	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9 =6/8*100
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital	Indeks	-	-	-	3,90	-
1.1	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah	Indeks	60	61	101,67%	75,00	81%
1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,65	96,12	101,55%	94,85	101%
1.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	75	75,18	100,24%	78,00	96%
1.4	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Poin	2,23	2,23	100,00%	2,43	92%

Sumber: E.81 (REAKSI) Tahun 2025

Dari tabel diatas untuk indikator indeks literasi digital belum terdapat realisasi tahun 2025 dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran untuk pelaksanaan survey pada saat penetapan dokumen Renstra Diskominfo tahun 2025-2029. Realisasi kinerja ini dapat direalisasikan pada tahun 2026 – 2029 karena realisasi kinerja ini membutuhkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk indikator kinerja sasaran Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik telah melampaui target akhir renstra karena indikator ini telah digunakan dari tahun 2021. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah, dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS), belum mencapai target akhir renstra masih diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target pada tahun 2026 – 2029.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang dibandingkan dengan capaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang :

Tabel 3. 10
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi *Benchmark* Kinerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	Realisasi *Benchmark* Kinerja Kota Bontang Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	96,12	69,11	100
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	4,7	4,30	3,60
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	4,45	4,70	4,13
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	4,6	3,80	3,50
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,64	2,91	3,27
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	75,18	60,70	70,07

Sumber: Data Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yakni Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik Kota Balikpapan lebih tinggi dari capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimatan Timur namun lebih rendah dari capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang. Untuk sasaran strategis Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan indikator kinerjanya adalah indeks dari masing-masing domain dengan capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang terkecuali indeks Domain Manajemen SPBE dan lebih tinggi dari capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimatan Timur terkecuali Indeks Domain Layanan SPBE serta indeks Domain Manajemen SPBE. Untuk strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yakni Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah lebih tinggi dari capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimatan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan benchmark kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 – 2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksud memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja dinas komunikasi dan informatika terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline.

Berikut tabel perbandingan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang dibandingkan dengan capaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang :

Tabel 3. 11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi *Benchmark* Kinerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	Realisasi *Benchmark* Kinerja Kota Bontang Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	Indeks	-	-	-
1.1	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks	61	-	-
1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Nilai	96,12	69,11	100
1.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	75,18	60,70	70,07
1.4	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Poin	2,23	2,68	2,02

Sumber: Data Olahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2025

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yakni Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang baru digunakan pada renstra tahun 2025 - 2029 yakni meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan tidak dapat dibandingkan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimatan Timur dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang karena tidak melakukan perhitungan indeks literasi digital dan survei kepuasan pengguna layanan digital. Untuk sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang baru digunakan pada renstra tahun 2025 - 2029 yakni Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral Kota Balikpapan lebih rendah dari capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimatan Timur namun lebih tinggi dari capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Untuk mengetahui tingkat capaian target kinerja sampai dengan akhir triwulan serta predikat kinerja yang diukur dengan skala nilai yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan. Adapun Ikhtisar capaian kinerja pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 12
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8	9	10
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	94,65	96,12	101,55%	Fungsi PPID pada PPID utama dan Pelaksana (OPD) telah berjalan dengan optimal dapat dilihat dari pemahaman PPID pelaksana dalam memenuhi pelayanan dan penyajian informasi sebagai contoh Puskesmas Margo Mulyo berhasil meraih predikat terbaik I se Provinsi Kaltim dalam Monev Kepatuhan Badan Publik oleh KI terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini juga menandakan pembinaan oleh PPID utama dinilai berhasil	Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait pelayanan Informasi Publik hingga tingkat Kelurahan dan UPTD Puskesmas, Memaksimalkan berbagai media sebagai sarana publikasi, Mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi media dan dengan pihak eksternal Pemerintah Kota Balikpapan.	Melaksanakan rapat kerja dan koordinasi level pimpinan sebagai pengambil kebijakan agar pelaksanaan pelayanan Informasi Publik bisa menjadi perhatian utama sehingga bisa lebih meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8	9	10
2	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	4,5	4,7	104,44%	Pada tahun 2025 telah disusun SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-407/2025 tentang Pedoman tata kelola TIK serta meningkatnya kolaborasi lintas perangkat daerah dan peran aktif tim koordinasi SPBE serta pendampingan dari instansi pembina (Kemenpan RB, Komdigi dan BSSN)	Sudah disusunya SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-407/2025 tentang Pedoman tata kelola TIK	Melakukan reviu Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 tahun 2023 tentang penyelenggaraan SPBE di daerah yang akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Digital dari Kementrian PAN-RB dan reviu Peratutran Wali Kota Balikpapan Nomor 3 tahun 2023 tentang Pedoman Manajemen Keamanan yang akan disesuaikan dengan kebijakan BSSN yang terbaru

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8	9	10
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	4,32	4,45	103,01%	Adanya peningkatan cakupan, kualitas dan interoperabilitas layanan publik dan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat (e-manuntung, e-Retribusi, Reaksi)	Sudah dilaksanakan intergrasi layanan publik pada aplikasi e-Manuntung	Pengembangan dan pengintegrasian portal layanan publik Pemerintah Kota Balikpapan yang lebih mudah di akses oleh masyarakat dan pengembangan data analitic yang dapat digunnakan pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	4	4,6	115,00%	Adanya penguatan struktur, proses dan mekanisme tata kelola spbe yang berjalan lebih efektif dari perencanaan awal seperti adanya	Terlaksanakanya penyusunan program kerja dan rapat kerja terkait SPBE dengan tim kooordinasi SPBE Kota Balikpapan	Melakukan penyesuaian indikator tata kelola SPBE dengan Pemerintaah Digital,

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8	9	10
							peningkatan penggunaan sistem penghubung layanan (SPL), komunikasi dan distribusi data melalui Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD dan manajemen resiko SPIP yang meningkatkan Kualitas Tata Kelola	dan terlaksananya pendampingan Pemerintah Digital dalam rangka mendukung transformasi SPBE ke Pemerintah Digital	Kolaborasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan masyarakat
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	2,64	2,64	100,00%	Penerapan fungsi manajemen SPBE telah berjalan sesuai perencanaan yag ditetapkan	Terlaksananya Bimtek Manajemen Resiko SPBE, Bimtek Manajemen Keamanan Informasi, terlaksananya audit TIK dan kolaborasi dengan 34 OP untuk mendukung terlaksananya manajemen SPBE	Melakukan penyesuaian indikator manajemen SPBE dengan Pemerintah Digital

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8	9	10
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	75	75,18	100,24%	Saran dan rekomendasi telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 yakni telah menyusun pohon kinerja dengan crosscutting, telah dilaksanakannya survey IKM Internal untuk mengukur pemahaman, kepedulian serta komitmen pegawai, telah disusunnya definisi operasional yang jelas atas kinerja yang akan dicapai serta telah memanfaatkan teknologi dalam pelaporan kinerja yakni menggunakan aplikasi REAKSI	Telah memaksimalkan digitalisasi data yang terintegrasi (seperti penggunaan aplikasi internal) untuk mempermudah pemrosesan, akurasi data, dan pemantauan kinerja secara *real-time* dan Adanya komitmen kuat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun-tahun sebelumnya secara disiplin.	Berdasarkan hasil evaluasi akan menindaklanjuti dengan memperbarui data, melengkapi dokumen (evidence), dan memaksimalkan capaian kinerja perangkat daerah

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2025

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 13
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025 - 2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	Indeks	-	-	-			
1.1	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks	60	61	101,67%	Promosi literasi SPBE dilaksanakan secara masif kepada pengguna layanan sebagai upaya Pemerintah Kota Balikpapan agar layanan publik dapat diakses dengan mudah	Telah dilaksanakan promosi literasi SPBE dan pelayanan informasi berupa promosi layanan publik yang memanfaatkan media milik Pemerintah Kota Balikpapan dan dilaksanakannya bimtek literasi digital kepada masyarakat	Lebih melibatkan pengguna layanan dalam menyusun dan mengembangkan layanan publik digital agar sesuai sesuai dengan kebutuhan masyarakat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Nilai	94,65	96,12	101,55%	Fungsi PPID pada PPID utama dan Pelaksana (OPD) telah berjalan dengan optimal dapat dilihat dari pemahaman PPID pelaksana dalam memenuhi pelayanan dan penyajian informasi sebagai contoh Puskesmas Margo Mulyo berhasil meraih predikat terbaik I se-Provinsi Kaltim dalam Monev Kepatuhan Badan Publik oleh KI terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini juga menandakan pembinaan oleh PPID utama dinilai berhasil	Melaksanakan Bimbingan Teknis terkait pelayanan Informasi Publik hingga tingkat Kelurahan dan UPTD Puskesmas, Memaksimalkan berbagai media sebagai sarana publikasi, Mengoptimalkan kerjasama dan kolaborasi media dan dengan pihak eksternal Pemerintah Kota Balikpapan.	Melaksanakan rapat kerja dan koordinasi level pimpinan sebagai pengambil kebijakan agar pelaksanaan pelayanan Informasi Publik bisa menjadi perhatian utama sehingga bisa lebih meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	75	75,18	100,24%	Saran dan rekomendasi telah ditindaklanjuti pada tahun 2025 yakni telah menyusun pohon kinerja dengan crosscutting, telah dilaksanakannya survey IKM Internal untuk mengukur pemahaman, kepedulian serta komitmen pegawai, telah disusunnya definisi operasional yang jelas atas kinerja yang akan dicapai serta telah memanfaatkan teknologi dalam pelaporan kinerja yakni menggunakan aplikasi REAKSI	Telah memaksimalkan digitalisasi data yang terintegrasi (seperti penggunaan aplikasi internal) untuk mempermudah pemrosesan, akurasi data, dan pemantauan kinerja secara *real-time* dan Adanya komitmen kuat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP tahun-tahun sebelumnya secara disiplin.	Berdasarkan hasil evaluasi akan menindaklanjuti dengan memperbarui data, melengkapi dokumen (evidence), dan memaksimalkan capaian kinerja perangkat daerah

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1.4	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Poin	2,23	2,23	100,00%	Partisipasi dua perangkat daerah, yaitu Bappeda dan Dinas Perdagangan, tergolong baik dan kooperatif dalam proses pengumpulan serta penyampaian bukti dukung untuk penilaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS).	Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah dengan melibatkan pembina data statistik sektoral guna meningkatkan pemahaman dan kualitas pemenuhan indikator penilaian IPS.	Diperlukan penguatan teknis dan cakupan pendampingan secara berkelanjutan terhadap seluruh perangkat daerah agar pembinaan lebih merata.

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Tahun 2025

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat dicapai dengan adanya Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yakni rencana strategis dan rencana kerja tahun 2025 yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Berikut analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2025 seperti yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 14
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	-					
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	100,24 %	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	100,24 %	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	87,15	87,22	100,08 %
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	87,15	87,25	100,11 %
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87,15	87,29	100,16 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,15	87,21	100,07 %
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,15	87,18	100,03 %
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,15	87,21	100,07 %
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,15	87,18	100,03 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE;	104,44 %	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	61	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;	90%	90%	100,00 %
		Indeks Domain Layanan SPBE;	103,01 %				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	90%	93%	103,33 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	115,00 %				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi	85%	93%	109,41 %
		Indeks Domain Manajemen SPBE.	100,00 %				Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	80%	93%	116,25 %
3	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	101,55 %	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	101,55 %	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80%	93,2%	116,50 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	80%	80%	100,00 %
4	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	101,55 %	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	101,55 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	90%	90%	100,00 %
							Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang menyelenggarakan statistik melalui Portal Satu Data	70%	70%	100,00 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE;	104,44 %	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	61	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	80%	80%	100,00 %
		Indeks Domain Layanan SPBE;	103,01 %								
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE;	115,00 %				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian	80%	80%	100,00 %
		Indeks Domain Manajemen SPBE.	100,00 %								

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas tentang analisa program dan kegiatan yang menunjang kebehasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, maka dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis :**

   Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

   Indikator Kinerja :

   Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik.

   Bila dilihat dari tabel diatas pada sasaran stategis ini memiliki 2 program yakni :

   a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

      Dalam program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yakni Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini melaksanakan publikasi terkait program prioritas maupun kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan, pelayanan informasi publik, kehumasan, pengelolaan media pengaduan Pemerintah Kota Balikpapan.

      Untuk pelaksanaan publikasi Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa kanal media sosial seperti Instagram, Youtube dan Facebook yang merupakan akun resmi Pemerintah Kota Balikpapan. Selain melakukan publikasi melalui media tersebut, juga dilakukan publikasi juga dilakukan melalui media luar ruang seperti baliho, videotron, spanduk dan

juga bekerjasama dengan media baik media cetak, media sosial dan media elektronik di Balikpapan dengan jumlah pengikut yang besar dan juga kerjasama media nasional baik cetak maupun elektronik.

Hal ini guna menyebarluasakan informasi dan Kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan agar jangkauan sasaran publikasinya pun semakin luas dan masyarakat dapat mengetahui dan paham mengenai kebijakan dan program-program yang dilaksanakan pemerintah terutama 9 (sembilan) program strategis Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021 - 2026.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan juga melaksanakan pengelolaan website Pemerintah Kota Balikpapan dimana melalui website ini masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan yang berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Website yang dikelola dengan baik melalui pemutakhiran konten secara rutin, transparansi data, serta fitur interaktif yang responsif, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang cepat, mudah, dan akurat. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang optimal, seperti informasi yang tidak diperbarui, akses yang sulit, atau gangguan teknis, dapat menghambat keterbukaan informasi publik. Melalui website

ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Dalam keterbukaan informasi publik, terdapat tiga kategori informasi, yakni Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Adapun jenis informasi yang informasi yang harus selalu dapat diakses oleh masyarakat adalah Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Gambar 3. 1
Dokumentasi Kerjasama Publikasi Diskominfo Tahun 2025

Gambar 3. 2
Dokumentasi Kanal Publikasi Diskominfo Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas melakukan pembinaan PPID pelaksana di 34 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pembinaan yang dilakukan dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan dan diikuti oleh peserta yakni pejabat dan petugas pelayanan informasi atau pengelola informasi dari setiap perangkat daerah dengan tujuan agar setiap PPID pelaksana semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya yakni membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing perangkat daerah.

Gambar 3. 3
Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2025

Pada kegiatan ini juga dilaksanakan pengelolaan media pengaduan publik Pemerintah Kota Balikpapan atau yang dikenal dengan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112. Layanan ini merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan Pusat Panggilan Darurat (Call Center 112) yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Layanan Nomor Panggilan Darurat 112 bertujuan untuk mempermudah masyarakat mengingat nomor darurat, mempercepat penanggulangan keadaan darurat, serta mempermudah koordinasi antar instansi terkait. Dibangunnya Pusat Panggilan Darurat (Call Center 112) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kondisi gawat darurat, seperti kebakaran, kerusuhan, kecelakaan, bencana alam, penanganan masalah kesehatan, gangguan keamanan dan ketertiban umum, dan/atau keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

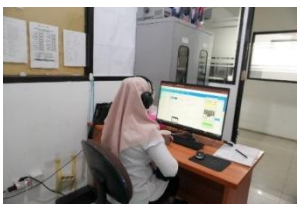

Gambar 3.4
Dokumentasi Layanan Nomor Panggilan Darurat 112

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan juga memiliki tugas dan fungsi dalam Pelayanan Informasi publik. Di tahun 2025 berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Sekolah, TNI-POLRI, Instansi Vertikal dan perusahaan BUMN serta kolaborasi antar bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yakni sebagai narasumber untuk melakukan sosialisasi terkait Literasi Digital, Strategi Digital dan Pencegahan Konflik Sosial. Dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang Literasi Digital demi keamanan dan kenyamanan di dunia Digital. Selain itu kolaborasi meliputi konten informasi terkait pelayanan publik.

Gambar 3.5
Dokumentasi Pelayanan Informasi Publik

Gambar 3. 6
Dokumentasi Bimtek Layanan Aduan & PPID

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan layanan hubungan media yang bertujuan terselenggaranya kegiatan hubungan yang baik antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan media massa. Media memiliki peran penting dalam kegiatan publikasi, karena itu media penting bagi setiap organisasi atau institusi sehingga perlu dijalin hubungan baik dengan media. Hubungan media merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi yang berhubungan dengan media massa dalam hal ini adalah kegiatan publikasi organisasi. Dalam memaknai hubungan media terdapat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam konteks yang lebih praktis, yaitu kerjasama dengan media hubungan baik antara kedua belah pihak saling membutuhkan, informasi untuk dipertukarkan manfaat untuk kedua belah pihak, ada target audience yang dituju, dan reputasi yang ingin dicapai. Adapun

prinsip dasar Membangun hubungan harmonis dengan media yaitu informasi disampaikan melalui kebijakan yang terkoordinasi, menjaga kontak dengan secara kontinyu, mendistribusikan kabar secepat mungkin, memanfaatkan berbagai kesempatan, mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan.

Kegiatan layangan hubungan media tersebut adalah kunjungan media massa dan pelaksanaan press release. Kunjungan media massa merupakan bentuk menjalin hubungan antara pemerintah daerah dengan media massa melalui kunjungan ke kantor media massa, salah satunya adalah pada saat media massa memperingati hari jadi (ulang tahun) dan Press release merupakan bentuk jalinan hubungan antara pemerintah daerah dengan media massa melalui pertemuan untuk membahas suatu isu. Dalam pertemuan dihadiri oleh wartawan dan pejabat terkait tema informasi yang akan disampaikan. Sementara itu waktu pelaksanaan bersifat tentative sesuai dengan sifat urgensi informasi disampaikan.

Gambar 3. 7
Dokumentasi Kegiatan Layanan Hubungan Media

Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan juga berupaya untuk memperluas cakupan masyarakat yang memperoleh informasi terkait program prioritas yakni dengan memaksimalkan pelayanan informasi melalui media luar ruang berupa videotron yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang berada di tempat-tempat strategis sebanyak 6 (enam) videotron yang berada di Taman Bekapai Kelurahan Klandasan Ilir, Taman Tiga Generasi Kelurahan Sepinggan, Simpang Balikpapan Baru Kelurahan Damai Baru, Kompleks Ruko Balikpapan Kelurahan Damai Baru, Didepan rumah jabatan Wali Kota Balikpapan Kelurahan Sepinggan dan di Stadion Batakan Kelurahan Manggar.

Gambar 3. 8
Dokumentasi Videotron

b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Dalam program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yakni Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota. Program dan kegiatan ini melaksanakan pengelolaan

dan pengumpulan data statistik sektoral Pemerintah Kota Balikpapan, membangun metadata statistik sektoral serta peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral. Adapun kegiatan statistik pada tahun 2025 adalah pelaksanaan bimbingan teknis statistik sektoral kepada 34 perangkat daerah. Bimbingan teknis ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam pengelolaan data statistik sektoral. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan memberikan pemahaman mengenai indikator, metode dan teknik evaluasi data sektoral, mengidentifikasi permasalahan dan capaian pengelolaan data serta mendorong perbaikan kualitas data agar lebih akurat, konsisten dan selaras dengan kebutuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Gambar 3.9
Dokumentasi Bimtek Statistik Sektoral Tahun 2025

Sebagai dukungan dalam pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral dan terstandar dan berkualitas maka telah disusun 2 (dua) dokumen Buku Metadata Indikator serta buku Metadata Statistik Sektoral. Penyusunan buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan definisi, konsep, metodologi, sumber data serta mekanisme pengumpulan dan pengolahan data sehingga data statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah menjadi konsisten, terintegrasi, mudah dimanfaatkan dalam perencanaan, evaluasi serta pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Gambar 3. 10
Buku Metadata Indikator dan Statistik Sektoral Tahun 2025

Pada tahun 2025 peningkatan peran statistik sektoral pada peran statistik nasional dilaksanakan secara optimal dengan capaian 100% perangkat daerah telah mengisi SIPD e-walidata sebagai wujud komitmen perangkat daerah dalam menyediakan, memutakhirkan dan menyelaraskan data

sektoral yang terstandar, valid, dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung integrasi data daerah dalam sistem statistik nasional. Guna mendukung kegiatan ini maka ditetapkanlah SK Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-243/2025 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kota Balikpapan dalam e-Walidata Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Tahun 2024.

2. Sasaran Strategis :

Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan

Indikator kinerja :

Indeks Domain Kebijakan SPBE;
Indeks Domain Layanan SPBE;
Indeks Domain Tata Kelola SPBE;
Indeks Domain Manajemen SPBE.

Bila dilihat dari tabel diatas pada sasaran stategis ini memiliki 2 program yakni :

a. Program Aplikasi Informatika;

Dalam program ini memiliki 2 (dua) kegiatan yang menunjang pencaian kinerja yakni :

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

  Pada kegiatan ini dilaksanakan penyediaan domain balikpapan.go.id guna memfasilitasi penggunaan aplikasi pelayanan publik Pemerintah Kota Balikpapan secara dalam

jaringan (daring) yang memanfaatkan domain dan sub domain balikpapan.go.id selain itu juga menyediakan bandwith atau kapasitas data yang digunakan di 34 perangkat daerah untuk mengakses internet, bandwidth menggunakan satuan ukur Mbps *(Megabit Per Second).*

- Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2022 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Layanan Jaringan Intra Instasi Pusat/Pemerintah Daerah, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana sebagian sudah mencapai level 5 dan telah diimplementasikan oleh 34 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Wali Kota tersebut maka disusunlah Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-407/2025 tentang Pedoman tata kelola TIK sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan tata kelola TIK. Selain itu juga terlaksanya kolaborasi lintas perangkat daerah dan peran aktif tim koordinasi SPBE serta

pendampingan dari instansi pembina (Kemenpan RB, Komdigi dan BSSN).

Tahun 2025 juga dilaksanakan Rapat kerja tim evaluasi SPBE, yang mengundang narasumber praktisi SPBE dari ITS untuk memberikan pendampingan 47 indikator penilaian SPBE. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan penilaian SPBE oleh Kemenpan RB. Kegiatan penilaian evaluasi SPBE Tahun 2025 menghasilkan Indeks SPBE Kota Balikpapan 4.22 dengan predikat sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan yaitu 4.

Salah satu faktor pendorong dari tercapainya indeks domain kebijakan, domain tata kelola, domain layanan, dan domain manajemen SPBE adalah adanya peningkatan cakupan, kualitas dan interoperabilitas layanan publik dan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat (e-manuntung, e-Retribusi, Reaksi). Selain itu adanya kolaborasi antar sektor layanan sehingga menjadi layanan publik digital yang terpadu.

Keunggulan aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemkot Balikpapan juga menjadi salah satu faktor keberhasilan yakni terlihat adanya dokumen pelaksanaan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, Rencana dan Anggaran

SPBE dan Inovasi Proses Bisnis. Khususnya pada Rencana dan Anggaran yang telah direviu dan ditingkatkan dan penyusunan Arsitektur SPBE Kota Balikpapan telah mengunakan aplikasi SIA (Sistem Informasi Arsitektur) Kementrian PAN-RB dan telah diterapkan pada seluruh perangkat daerah. Yang kedua yakni keunggulan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemkot Balikpapan adalah penerapan Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan Layanan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Khususnya pada pembangunan aplikasi SPBE dan sistem penghubungan layanan yang sudah direviu sedangkan layanan jaringan intra pemerintah yang telah direviu dan ditindaklanjuti peningkatannya. Yang ketiga adalah keunggulan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemkot Balikpapan adalah pelaksanaan tim kooordinasi dan kolaborasi penerapan SPBE yang telah dilaksanakan dan dilakukan reviu.

Gambar 3. 11
Dokumentasi Kegiatan SPBE Tahun 2025

Menindaklanjuti surat dari Kemenpan RB nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan kepada Intansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE maka dilaksanakan pendampingan pemerintah digital oleh Kemenpan RB dengan peserta dari 34 perangkat daerah dalam rangka persiapan dan sosialisasi indikator baru dalam pemerintah digital sebagai persiapan evaluasi pemerintah digital tahun 2027. Selain kegiatan SPBE juga dilaksanakan rapat kerja dewan smart city dan tim pelaksana dalam penyusunan program inovasi yang akan diusung dalam evaluasi smart city tahun 2025 yang dilaksanakan februari 2026. Penilaian evaluasi smart city oleh komdigi, indikator penilaian terdiri dari:

1. Outcome *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, smart enviroment*
2. Program kerja *quick wins*
3. Program penggunaan teknologi terbaru

Peran perangkat daerah dalam penilaian ini sebagai pendukung data untuk pengisian evaluasi smart city.

Dalam rapat kerja ini juga disusun jadwal Monitoring dan evaluasi masterplan smartcity ke 34 perangkat daerah oleh tim pelaksana smart city untuk melihat realisasi program smart city berdasarkan masterplan smart city yang tertuang dalam perwali nomer 7 tahun 2023 tentang masterplan smartcity kota balikpapan tahun 2021 – 2026. Dari hasil monitoring ini telah diperoleh data dan informasi program smart city oleh perangkat daerah yang terlaksana sesuai masterplan smartcity.

Kegiatan ini juga Menindaklanjuti rekomendasi oleh evaluator penilaian smart city tahun 2024, salah satunya terkait kebijakan smart city, program smart city dan keikutsertaan forum smart city.

Gambar 3. 12
Dokumentasi Kegiatan SMART CITY Tahun 2025

Dalam pelaksanaan nya juga dilakukan kegiatan berupa Bimtek, yaitu:

1. Bimtek literasi promosi SPBE, mempromosikan 3 layanan digital yang diselenggarakan oleh pemkot balikpapan

yaitu e-manuntung, aplikasi perijinan, dan aplikasi kependudukan. Peserta dari bimtek ini diikuti oleh masyarakat.

2. Bimtek literasi Smart city, dengan peserta pelajar dan mahasiswa yang mempelajari Artificial Intelligence (AI) yang dapat membantu mahasiswa dan pelajar untuk mengakses informasi dengan tepat dan efisien, peningkatan produktivitas akademik, serta kreativitas dan inovasi.
3. Bimtek arsitektur SPBE dengan peserta 34 perangkat daerah dalam rangka guna menyusun proses bisnis pada aplikasi SIA SPBE
4. Bimtek manajemen resiko SPBE dengan peserta 34 perangkat daerah yang dilaksanakan agar perangkat daerah lebih memahami penyusunan formulir manajemen SPBE sebagai kewajiban perangkat daerah dalam melaksanakan belanja SPBE.
5. Bimtek keamanan data dengan peserta 34 perangkat daerah agar perangkat daerah dapat memahami dalam menjaga kerahasiaan data.

Gambar 3. 13
Dokumentasi Bimtek SPBE & SMART CITY
Tahun 2025

Pengembangan aplikasi yang dilaksanakan tahun 2025 adalah pengembangan aplikasi smart city, emanuntung, optimalisasi layanan cloud balikpapan, aplikasi REAKSI dan elektronifikasi layan retribusi. Dan dilakukan juga pendampingan pengembangan aplikasi perangkat daerah agar aplikasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah sesuai standar teknis Diskominfo yang tertuang dalam SK Wali Kota Balikpapan nomor 188.45/407/2025 tentang pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi.

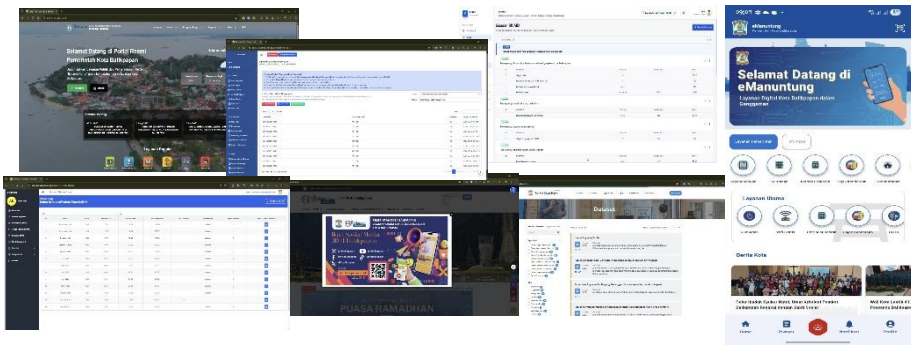

Gambar 3. 14
Dokumentasi Pengembangan Aplikasi Tahun 2025

b. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Dalam program ini memiliki 1 (satu) kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yakni Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 adalah Penyusunan dokumen Indeks KAMI untuk mengukur tingkat kematangan keamanan informasi di lingkup Diskominfo Kota Balikpapan. Dokumen ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi baik

internal maupun dalam penilaian SPBE. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan layanan Sertifikat Elektronik (Perekaman Tanda Tangan Elektronik), Pemantauan Kerentanan Sistem Informasi dan Workshop Keamanan Informasi. Layanan sertifikat elektronik dilaksanakan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan tujuan pengamanan data dan informasi yang dikelola perangkat daerah. Selain itu juga dilakukan pemantauan celah-celah keamanan seluruh sistem informasi milik Pemerintah Kota Balikpapan untuk meminimalisir serangan cyber. Selanjutnya juga dilaksanakan workshop Keamanan Informasi yang diikuti oleh seluruh pranata komputer agar dapat meningkatkan *awarness* terhadap sistem informasi yang dikelolanya.

Gambar 3. 15
Dokumentasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian
Tahun 2025

3. **Sasaran Strategis :**

   Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Indikator Kinerja :

Nilai SAKIP Diskominfo

Pada sasaran stategis ini memiliki 1 (satu) program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Program ini dilaksanakan sebagai penunjang dalam pencapaian ketiga urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yakni Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan berdampak pada pencapaian kinerja adalah :

a) Penyusunan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 yakni penyusunan Renja dan Renja Perubahan. Untuk dapat menyusun dokumen ini dilaksanakan juga forum perangkat daerah dengan mengundang stakeholder dan perangkat daerah terkait, dengan pelaksanakaan forum perangkat daerah ini diharapkan dapat menyempurnakan penyusunan dokumen rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu juga dilakukan penyusunan dokumen Evaluasi Renja tahun 2025. Sebelum penyusunan ini dilakukan juga monitoring dan evaluasi kegiatan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan dan realiasi kinerja pada renja dan IKU pada setiap triwulan. Selain itu juga adanya pelaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2025 dengan hasil meningkatnya nilai dari tahun 2024 yakni 74,26 dan tahun 2025

menjadi 75,18 dengan predikat BB (sangat baik);

b) Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dari Eselon II hingga Eselon IV/JFT ahli muda yang merangkap sebagai Subkoordinator serta pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) seluruh Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan serta manajemen SDM dengan penegakan disiplin dan kode etik pegawai;
c) Melaksanakan penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk penyusunan bezzeting dan pemetaan jabatan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dengan melibatkan bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Kota Balikpapan dan BKPSDM sebagai perangkat daerah pembina;
d) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi pada loket pelayanan dikantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan serta melaksanakan kegiatan penunjang lainnya seperti fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi internal serta kebutuhan lainnya yang diperlukan guna lancarnya kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023.
e) Melaksanakan survey internal terkait pemahaman pegawai Diskominfo Kota Balikpapan terhadap kinerja masing masing pegawai.
f) Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yakni Bimbingan Teknis internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

yang dilaksanakan 2 kali di tahun 2025 yahni di bulan Februari terkait Pengelolaan Pelayanan Publik dan bulan November terkait Penyusunan Proses Bisnis Diskominfo Kota Balikpapan Pada Aplikasi SIA SPBE. Dengan kegiatan ini diharapkan tercapainya sinergitas, integrasi, persamaan persepsi dan pola pikir arah tujuan dalam aktivitas pelayanan pada masyarakat dan aparatur sipil negara dan meningkatkan kapasitas pegawai yang terlibat dalam pengelolaan informsi publik dan penerapan SPBE.

g) Pada tahun 2025 juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi pengukuran kinerja bagi seluruh ASN agar seluruh pegawai dapat mengerti dan memahami hasil pengukuran kinerja dimana hasil ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mencapai target kinerja yang ditentukan. Kegiatan ini juga dirangkai dengan sosialisasi SKP dengan narasumber dari BKPSDM, diharapkan dengan sosialisasi ini setiap pegawai memahami setiap target kinerja yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil rekomendasi Inspektorat Kota Balikpapan dalam dokumen SKE AKIP Diskominfo tahun 2025.

Gambar 3. 16
Dokumentasi Kegiatan Rapat Internal
Tahun 2025

Gambar 3. 17
Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Teknis
Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BALIKPAPAN

LAPORAN
HASIL SURVEI PEMAHAMAN KINERJA INTERNAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2025

docs.google.com/forms/

SURVEY INTERNAL DISKOMINFO
TERKAIT KINERJA TAHUN 2025

Gambar 3. 18
Dokumen Survey Internal Pemahaman Kinerja
Tahun 2025

Gambar 3. 19
Dokumentasi sosialisai Pengukuran Kinerja dan SKP
Tahun 2025

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Guna dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis atas Efisisensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

   Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor SDM. Demikian pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas SDM yang terdapat di dalamnya. Bedasarkan perhitungan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan ASN berjumlah 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan hanya didukung oleh 47 (empat puluh tujuh) ASN.

Tabel 3. 15
Jumlah Aparatur Sipil Negara (PNS)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki (L)	Perempuan (P)
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	1	-
2	Sekretaris	1	-
3	Kepala Bidang	-	1
4	Kepala Sub Bagian	-	2
5	Kepala Seksi	1	-
6	Pranata Humas	3	3
7	Pranata Komputer	11	8
8	Statistisi	-	1
9	Sandiman	1	-
10	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	-
11	Pengadministrasian Perkantoran	2	5
12	Penata Layanan Operasional	-	2
13	Operator Layanan Operasional	4	-
Jumlah		**25**	**22**

Sumber: Data Kepagawaian Diskominfo Tahun 2025

Tabel 3. 16
Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1	2	3	4
1	SMA/D1/D2	32	11
2	D3	27	7
3	D4/S1	105	27
4	S2	13	2
Jumlah		**177**	**47**

Sumber: Data Kepagawaian Diskominfo Tahun 2025

Dari data pada tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan di dominasi oleh jenjang pendidikan D4/S1 yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang atau sebesar 15,25% dari kebutuhan. Selanjutnya adalah jenjang pendidikan D3 dengan jumlah 7 (tujuh) orang atau sebesar 3,95% dari kebutuhan, kemudian untuk jenjang SMA berjumlah 11 (sebelas) orang atau sebesar 6,21%. Dari tabel diatas pun dapat dilihat bahwa jumlah pegawai saat ini yaitu 47 orang masih selisih cukup banyak dari jumlah kebutuhan yakni sebesar 177 orang atau hanya memiliki 26,55% dari kebutuhan. Untuk dapat mengatasi hal ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan melakukan rekruitmen tenaga ahli yang meliputi bidang pekerjaan seperti Programmer, Jurnalis, Tenaga Ahli Infrastruktur TIK, Tenaga Ahli Smart City, Tenaga Ahli SPBE dan semuanya berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Dari aspek efisiensi, dinas telah melakukan langkah strategis dengan merekrut tenaga ahli di bidang spesifik, seperti programmer, jurnalis, tenaga ahli infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tenaga ahli smart city, serta tenaga ahli Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah ini bertujuan untuk menutup kesenjangan kompetensi yang tidak dapat dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia. Selain itu, komposisi SDM yang ada juga didominasi oleh pegawai dengan jenjang pendidikan tinggi, yaitu D4/S1 dan S2, yang berpotensi meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas berbasis teknologi dan informasi. Struktur jabatan yang

mencakup posisi strategis, seperti kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan pranata humas, juga turut mendukung efektivitas dalam pengelolaan tugas dan koordinasi internal.

Namun, terdapat beberapa faktor inefisiensi yang masih menjadi kendala dalam optimalisasi kinerja organisasi. Salah satu permasalahan utama adalah kekurangan SDM yang cukup signifikan, di mana dari kebutuhan sebanyak 177 ASN, saat ini hanya tersedia 47 ASN atau sekitar 26,55% dari kebutuhan ideal. Ketimpangan ini berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan beban kerja per individu. Selain itu, terdapat kesenjangan antara kualifikasi pendidikan pegawai dengan kebutuhan organisasi, terutama pada jenjang D3 dan D4/S1 yang masih jauh dari jumlah ideal. Ketimpangan ini dapat mempengaruhi kapasitas organisasi dalam menjalankan program yang berbasis teknologi dan digitalisasi. Ketergantungan terhadap tenaga ahli non-ASN juga menjadi tantangan tersendiri dalam jangka panjang, terutama dalam aspek keberlanjutan dan transfer pengetahuan kepada ASN. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti optimalisasi rekrutmen ASN serta peningkatan kompetensi pegawai yang ada, guna memastikan keberlanjutan dan efisiensi kinerja organisasi secara menyeluruh.

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

   Analisis atas efisiensi penggunaan sarana prasarana pada Dinas Komuniksi dan Informatika Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 17
Efisiensi Pengguna Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung/Bangunan	1	Rusak Ringan	✓		Status Pinjam pakai dengan kondisi ruang yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada
2	Kendaraan Dinas	9	Baik	✓		Digunakan untuk operasional pejabat dan operasional lapangan
3	Kendaraan Dinas	3	Baik	✓		Status Sewa Digunakan Untuk operasional
4	Lemari DryBox	1	Baik	✓		Digunakan untuk menyimpan peralatan studio audio dan video
5	Smartboard Huawei	2	Baik	✓		Digunakan untuk rapat, presentasi, diskusi, pelatihan, dan koordinasi kerja
6	Speaker Portable	1	Baik	✓		Digunakan untuk penyampaian suara saat rapat, presentasi, sosialisasi, pelatihan, dan video conference
7	Camcorder SONY HXR NX800 Hanheld	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
8	Soundcard SSL 12	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
9	Mixer Audio Digital MIDAS MR18	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
10	SRT 6KVA APC SMART UPS	1	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
11	K&F KNF CONCEPT BATTERY FOR SONY NP FZ100	4	Baik	✓		Digunakan Untuk Charger Baterai Kamera
12	Mic Camera HOLLYLAND LARK MAX DUO	3	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
13	Intercome HOLLYLAND SOLIDCOM C1 8 PERSON WIRELLES	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
14	Video Switcher CINETREAK STREAM 1	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
15	Lightstand Lipat CARBON FIBER TRIPOD	3	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
16	Lensa Kamera	10	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
17	Headset	2	Baik	✓		Mendukung Administrasi Pekerjaan Call Center 112
18	Tas Kamera K&F CONCEPT CAMERA BACKPACK 25L	3	Baik	✓		Untuk Menyimpan Perangkat Kamera
19	LAMPU FLASH KAMERA GODOX V860II C TTL HSS 18000S	2	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
20	KAMERA PTZ OPTIC 20X NDI (Camera Conference)	5	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
21	ALAT EDITING BLACKMAGIC DESIGN DAVINCI	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
22	LIGHTING VIDEO ZHIYUN MOLUS X100 PRO	3	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
23	ACTION CAMERA 360 INSTA360 ONE	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
24	ACTION CAMERA 4K GOPRO HERO 13 BLACK	3	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
25	BATERAI V MOUNT FXLION NANO TWO BUNDLE	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
26	GIMBAL KAMERA DJI OSMO MOBILE 7	8	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
27	PROTECTIVE CAGE KAMERA FOR SONY FX3/FX30	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
28	TILTA FLOAT HAND HELD GYMBAL SUPPORT SYSTEM	2	Baik	✓		Sistem Pendukung Gimbal Genggam
29	HOLLYLAND COSMO C2	3	Baik	✓		Wireless HDMI Video Transmitter
30	Remote Drone DJI RC PRO	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
31	Personal Computer	8	Baik	✓		Mendukung Administrasi Pekerjaan
32	Kamera Digital SONY ALPHA A7R V	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
33	Laptop	1	Baik	✓		Mendukung Administrasi Pekerjaan
34	Notebook	7	Baik	✓		Mendukung Administrasi Pekerjaan
35	Hard disk	24	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
36	Monitor	2	Baik	✓		Mendukung Administrasi Pekerjaan
37	Printer	1	Baik	✓		Mendukung Administrasi Pekerjaan
38	External/Potable Harddisk	12	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
39	Router	11	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
40	Rak Server	2	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
41	Switch	27	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
42	Acces Point	15	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
43	Fortigate 201F Firewall	1	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
44	Minemedia Q8 Live Bonding Encoder GSM MultiNetwork	2	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
45	RAM SERVER DDR4 ECC UNBUFFERED DIMM SYNOLOGY VER 1	4	Baik	✓		Untuk server/perangkat jaringan
46	AC	2	Baik	✓		Mendukung Administrasi Pekerjaan
47	Lighting Stand Tripod	1	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
48	Lensa Filter	2	Baik	✓		Mendukung Kegiatan Liputan/Live Streaming
Jumlah		**202**				

Sumber: Data Aset Diskominfo Tahun 2025

Sarana prasarana menjadi bagian yang penting dalam mendukung capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, dimana dalam pelaksanaan kegiatannya membutuhkan sarana dan prasana TIK dan penunjang kegiatan komunikasi publik. Jika dilihat dari jumlah sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai. Kondisi seperti ini tentu akan menghambat capaian kinerja namun untuk mengantisipasinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan melakukan kerjasama dengan media dan agensi dalam pembuatan konten maupun kebutuhan komunikasi publik lainnya.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

   Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisien ıri formul $E = \frac{\sum_{i=1}^{n}\left((PAKi \times CKi) - RAKi\right)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$

   Keterangan:

   E : Efisiensi

   CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

   PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

   RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3. 18
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Literasi Digital (Indeks)	Indeks	PK Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029	0	0	0,00%	Rp 49.347.947.162,50	Rp 41.258.097.132,00	83,61%	0,00%	-
1.1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	PK Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029	94,65	96,12	101,55%	Rp 23.469.367.702,50	Rp 19.230.044.179,00	81,94%	18,69%	Efisien
1.2	Meningkatnya kematangan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	Poin	PK Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029	2,23	2,23	100,00%					
1	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan	Indeks Domain Kebijakan SPBE	Nilai	PK Perubahan Tahun 2025	4,50	4,7	104,44%	Rp 14.320.380.178,00	Rp 12.105.447.622,00	84,53%	19,36%	Efisien
		Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai		4,32	4,45	103,01%					
		Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai		4,0	4,6	115,00%					
		Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai		2,64	2,64	100,00%					
1.3	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan digital Pemerintah Kota Balikpapan	Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Digital Pemerintah (Indeks)	Indeks	PK Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029	60	61	101,67%					

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Diskominfo	Nilai	PK Perubahan Tahun 2025	75,00	75,18	100,24%	Rp 11.558.199.282,00	Rp 9.922.605.331,00	85,85%	14,36%	Efisien
1.4	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai	PK Perubahan atas Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029	75	75,18	100,24%					

Sumber: Perhitungan Efisiensi Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2025 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Anggaran secara keseluruhan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yakni Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Layanan Publik sebesar Rp. 49.347.947.162,50 dengan realisasi sebesar Rp. 41.258.097.132,00. Efisiensi pada anggaran untuk mendorong capaian tujuan ini belum dapat dihitung dikarekan penetapan tujuan ini pada renstra tahun 2025-2029 yang belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dan anggaran.
2. Anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp. 23.469.367.702,50 dengan realisasi sebesar Rp. 19.230.044.179,00 atau sebesar 81,94% dari total anggaran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan efisiensi sebesar 18,69%.

3. Anggaran yang ada untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan sebesar Rp. 14.320.380.178,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.105.447.622,00 atau sebesar 84,53% dari total anggaran program Aplikasi Informatika dengan efisiensi sebesar 19,36.
4. Anggaran yang ada untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar Rp. 11.558.199.282,00 yang direalisasikan sebesar Rp. 9.922.605.331,00 atau sebesar 85,85% dari total anggaran program dan realisasi kinerja sebesar 100,24% dengan realisasi 75,18 dari target kinerja 75,00 dengan efisiensi 14,36%. Adapun sub kegiatan yang memberikan dampak pada persentase efisiensi anggaran ini adalah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Total keseluruhan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 49.347.947.162,50,- dengan realisasi sebesar 83,61% atau sebesar Rp. 41.258097.132,00. Adapun anggaran yang tidak direalisasikan sebesar 16,39% atau sebesar Rp. 8.089.850.030,50. Anggaran yang tidak direalisasikan ini sebagian besar adalah anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN dan pengelolaan komunikasi publik. Anggaran lain yang tidak direalisasikan adalah kegiatan survey penyebaran

Informasi Publik dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintah Kota Balikpapan dikarenakan kegiatan survey telah dilaksanakan secara mandiri oleh tim monitoring dan analisis media formal dan media sosial. Selain itu anggaran yang tidak direalisasikan adalah anggaran dari sisa kegiatan yang telah dilaksanakan namun secara keuangan tidak di realisasikan 100%. Selain itu anggaran yang tidak terealisasikan adalah pada sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah yakni pengadaan DED command center, tidak terlaksananya kegiatan ini tertuang dalam surat dari Diskominfo kepada Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor 000/463/DISKOMINFO tanggal 28 Oktober 2025 perihal Penundaan dan Pengalokasian kembali penyusunan DED Command Center TA 2026 Sub kegiatan dengan sisa anggaran terbesar yakni sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.030.998.163,00 dikarenakan pada pelaksanaan kegiatan banyak media yang masuk dalam perencanaan tidak dapat memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan sehingga kegiatan tetap berjalan namun hanya dengan media yang masuk dalam kualifikasi. Adapun rincian pagu Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta dengan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 19
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran				
		Pagu		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3		4		5
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Rp**	**11.558.199.282,00**	**Rp**	**9.922.605.331,00**	**85,85%**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Rp**	**7.706.290.000,00**	**Rp**	**6.632.444.121,00**	**86,07%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp	7.706.290.000,00	Rp	6.632.444.121,00	86,07%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Rp**	**968.574.340,00**	**Rp**	**863.669.244,00**	**89,17%**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp	62.574.340,00	Rp	58.025.250,00	92,73%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp	840.000.000,00	Rp	742.690.732,00	88,42%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	66.000.000,00	Rp	62.953.262,00	95,38%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Rp**	**1.535.225.912,00**	**Rp**	**1.431.104.881,00**	**93,22%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	11.923.800,00	Rp	9.903.420,00	83,06%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	979.710.700,00	Rp	958.052.020,00	97,79%

No.	Uraian	Anggaran				
		Pagu		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3		4		5
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	298.288.050,00	Rp	231.376.325,00	77,57%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	25.219.610,00	Rp	22.523.143,00	89,31%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	19.982.000,00	Rp	19.374.000,00	96,96%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	200.101.752,00	Rp	189.875.973,00	94,89%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Rp**	**381.800.000,00**	**Rp**	**345.595.140,00**	**90,52%**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	93.600.000,00	Rp	82.500.000,00	88,14%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	187.200.000,00	Rp	165.000.000,00	88,14%
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Rp	101.000.000,00	Rp	98.095.140,00	97,12%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**595.407.580,00**	**Rp**	**418.234.487,00**	**70,24%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	539.000,00	Rp	179.500,00	33,30%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	190.895.600,00	Rp	72.600.489,00	38,03%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	15.000.000,00	Rp	14.635.350,00	97,57%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	388.972.980,00	Rp	330.819.148,00	85,05%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Rp**	**370.901.450,00**	**Rp**	**231.557.458,00**	**62,43%**

No.	Uraian	Anggaran				
		Pagu		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3		4		5
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	137.000.000,00	Rp	67.102.650,00	48,98%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	179.600.000,00	Rp	113.495.263,00	63,19%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	29.301.450,00	Rp	27.163.920,00	92,71%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	25.000.000,00	Rp	23.795.625,00	95,18%
	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan					
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Rp**	**10.000.000,00**	**Rp**	**9.879.000,00**	**98,79%**
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**10.000.000,00**	**Rp**	**9.879.000,00**	**98,79%**
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Rp	10.000.000,00	Rp	9.879.000,00	98,79%
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Rp**	**13.981.946.320,00**	**Rp**	**11.823.024.439,00**	**84,56%**

No.	Uraian	Anggaran				
		Pagu		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3		4		5
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**13.981.946.320,00**	**Rp**	**11.823.024.439,00**	**84,56%**
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp	1.067.738.295,00	Rp	791.024.086,00	74,08%
	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Rp	917.600.000,00	Rp	457.595.649,00	49,87%
	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp	707.009.410,00	Rp	610.766.450,00	86,39%
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Rp	30.948.795,00	Rp	28.420.255,00	91,83%
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp	942.320.965,00	Rp	904.773.753,00	96,02%
	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Rp	32.248.590,00	Rp	31.045.250,00	96,27%
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp	831.959.723,00	Rp	661.131.830,00	79,47%
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp	7.229.824.272,00	Rp	6.426.466.593,00	88,89%
	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp	2.096.076.270,00	Rp	1.840.672.075,00	87,82%

No.	Uraian	Anggaran				
		Pagu		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3		4		5
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Rp	126.220.000,00	Rp	71.128.498,00	56,35%
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik					
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Rp**	**22.783.736.680,00**	**Rp**	**18.666.027.040,00**	**81,93%**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**22.783.736.680,00**	**Rp**	**18.666.027.040,00**	**81,93%**
	Relasi Media	Rp	82.490.000,00	Rp	19.050.000,00	23,09%
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp	-	Rp	-	-
	Pelayanan Informasi Publik	Rp	170.577.375,00	Rp	75.515.200,00	44,27%
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp	759.160.525,00	Rp	465.173.467,00	61,27%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp	18.163.219.740,00	Rp	15.132.221.577,00	83,31%
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Rp	199.245.000,00	Rp	199.245.000,00	100,00%
	Penyusunan Konten	Rp	3.409.044.040,00	Rp	2.774.821.796,00	81,40%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Rp**	**685.631.022,50**	**Rp**	**564.017.139,00**	**82,26%**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**685.631.022,50**	**Rp**	**564.017.139,00**	**82,26%**
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp	266.434.917,50	Rp	190.275.107,00	71,42%

No.	Uraian	Anggaran				
		Pagu		Realisasi		Capaian (%)
1	2	3		4		5
	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp	255.496.105,00	Rp	210.495.256,00	82,39%
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Rp	163.700.000,00	Rp	163.246.776,00	99,72%
	Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Rp**	**328.433.858,00**	**Rp**	**272.544.183,00**	**82,98%**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Rp**	**328.433.858,00**	**Rp**	**272.544.183,00**	**82,98%**
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	133.486.808,00	Rp	125.823.625,00	94,26%
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp	140.000.000,00	Rp	108.974.518,00	77,84%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	54.947.050,00	Rp	37.746.040,00	68,70%
	Total	**Rp**	**49.347.947.162,50**	**Rp**	**41.258.097.132,00**	**83,61%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* salah satunya didasari dengan asas akuntabilitas yang memerlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang wajid disusun oleh instansi pemerintah baik dari tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan perangkat daerah untuk mengetahui tingkat akuntabilitasnya. Laporan kinerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 sekaligus sebagai kendali dan pemicu peningkatan kinerja di setiap unit kerja Dinas komunikasi dan Informatika, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kedepannya.

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yakni dengan 6 (enam) Indikator kinerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis :**

   Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

   Indikator Kinerja :

   Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

   Capaian kinerja dari sasaran strategis ini yakni 101,55% dengan realiasi nilai 96,12 dari target kinerja

sebesar 94,65 dengan predikat penilaian realisasi kinerja **"melebihi target"**.

2. **Sasaran Strategis :**

   Meningkatnya Pencapaian Peta Rencana Arsitektur SPBE Kota Balikpapan

   Indikator Kinerja :

   Indeks Domain Kebijakan SPBE;

   Indeks Domain Layanan SPBE;

   Indeks Domain Tata Kelola SPBE;

   Indeks Domain Manajemen SPBE;

   Sasaran strategis ini memiliki 4 indikator kinerja, adapun capaian kinerja dari Indikator pertama yakni Indeks Domain Kebijakan SPBE sebesar 104,44% dengan predikat penilaian realisasi kinerja **"melebihi target"** terhadap realisasi kinerja nilai 4,7 dari target kinerja sebesar nilai 4,50. Indikator kinerja kedua yakni Indeks Domain Layanan SPBE dengan capaian kinerja sebesar 103,01% dengan predikat penilaian realisasi kinerja **"melebihi target"** terhadap capaian kinerja nilai 4,45 dari target kinerja sebesar nilai 4,32. Indikator kinerja ketiga yakni Indeks Domain Tata Kelola SPBE dengan capaian kinerja sebesar 115,00% dengan predikat penilaian realisasi kinerja **" melebihi target"** terhadap realisasi kinerja nilai 4,6 dari target kinerja sebesar nilai 4,0. Indikator kinerja keempat yakni Indeks Domain Manajemen SPBE dengan capaian kinerja sebesar 100,00% dengan predikat penilaian realisasi kinerja **"sesuai target"** terhadap realisasi kinerja nilai 2,64 dari target kinerja sebesar nilai 2,64. Apabila dirata-ratakan adapun rata-rata dari capaian keempat indikator kinerja ini adalah 105,61% dengan predikat penilaian realisasi kinerja **"melebihi target".**

3. **Sasaran Strategis :**

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja :

Nilai SAKIP Diskominfo

Capaian kinerja dari Indikator Kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP Diskominfo adalah 100,24% yakni dengan realisasi nilai 75,18 dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,00 dengan kriteria penilaian realisasi kinerja **"melebihi target".**

Dari keseluruhan capaian rata-rata capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator adalah **102,46%** dengan predikat penilaian realisasi kinerja **"melebihi target"**. Dengan demikian, dari rata-rata capaian kinerja diatas secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026.

4.2. Saran

Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan hasil yang baik dengan hasil dapat mencapai target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk pada tahun 2025 yakni sasaran 1 yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik, sasaran 2 yaitu Meningkatnya pencapaian peta rencana arsitektur SPBE Kota Balikpapan dan sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun untuk tetap meningkatkan kualitas dan peningkatan pencapaian kinerja maka dibutuhkan penguatan internal Dinas

Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang saling bersinergi antar bidang dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasarana yang ada. Perencanaan yang jelas, terukur, efektif, efisien serta komprehensif dibutuhkan dalam pelaksanaan agar dapat terarah dan mencapai target yang telah ditetapkan. Selanjutnya evaluasi juga menjadi poin yang penting guna mengidentifikasi apa yang harus ditingkatkan, meningkatkan kualitas serta memperbaiki kinerja kedepannya. Secara spesifik ada beberapa langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dan juga dalam upaya strategi untuk menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Digitalisasi dan integrasi layanan guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas dan kualitas informasi, hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat;
2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program pembangunan kota dan layanan publik yang diberikan serta dalam mewujudkan smart city;
4. Berupaya untuk meningkatkan dan menambah jumlah SDM yang menangani infrastruktur jaringan Teknologi Informasi Pemerintah Kota Balikpapan;
5. Mengikutsertakan pegawai dalam bidang informasi komunikasi dan publikasi dalam bimbingan teknis untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan;

6. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

Balikpapan, 27 Februari 2026

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ERRIANSYAH HARYONO